



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, diperlukan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP diperlukan Tim Pengelola SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Koordinator Penyusunan Perencanaan Kinerja;
6. Koordinator Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; dan
7. Anggota.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan uraian tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Nanang Yunanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Prihantoro PN, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Sragen	Pengarah
2	Mukhsin, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pengarah
3	M. Zainal Arifin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pengarah
4.	MH Isnaeni, S.Pd., Gr., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pengarah
5.	Irwan Sehabudin, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Sragen	Pengarah
6.	Masykur, S.Sos., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sragen	Penanggung Jawab
7.	Herlina Astri, S.S.T., M.P.S.Sp.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin)	Ketua
8.	Winanti Yulistuti, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
9.	Yogie Tangguh Aprihantoro, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Penyusunan Perencanaan Kinerja
10.	Lucman Setyawan Imam Prasetyo, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
11.	Suharnanto, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
12.	Nanang Yunanto, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (TPPH)	Anggota
13.	Arum Kismaharani, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas SDM)	Anggota
14.	Suwarno, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Agung Sapto Adi, S.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Faisal Adami, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	Indriana Felayani Putri, S.I.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18.	Khusnul Azizatunnishak, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19.	Dwi Prasetyo, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota
20.	Puguh Iرنanto, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
21.	Ajeng Kirana Miftakhul Janah, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
22.	Rizky Widadianto, S.M.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
23.	Faisal Muafa, S.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
24.	Budi Santoso, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
25.	Luki Ristiyanti	Pengadministrasi Perkantorn	Anggota
26.	Kasirin	Operator Layanan Operasional	Anggota
27.	Kusriyanto	Operator Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
28.	Rafiq Nuryanto, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
29.	Fajar Rahmadani, S.Kom	PPNPN	Anggota
30.	Inna Nurul Aisyah, S.H.	PPNPN	Anggota
31.	Nensi Ananda Nilam Sari, S.E	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Nanang Yudianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2026

TUGAS DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

A. Tugas Tim

Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai tugas:

1. Menyusun dokumen SAKIP KPU Kabupaten Sragen;
2. Menyusun dan mereviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Menyusun Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun dan melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Menyusun Rencana Aksi Kinerja;
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan validasi data kinerja;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala;
8. Menyusun Laporan Kinerja (lkjip);
9. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian PANRB; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SAKIP.

B. Uraian Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan SAKIP.
2.	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan SAKIP.
3.	Ketua	1. Memimpin penyusunan dokumen SAKIP. 2. Mengoordinasikan seluruh anggota tim. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua KPU.
4.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi, jadwal rapat, notulen, dokumentasi, dan laporan.
5.	Koordinator	1. Menghimpun data dari seluruh subbagian. 2. Melakukan validasi data. 3. Menyusun laporan sesuai bidang masing-masing.
6.	Anggota	1. Menyediakan data dukung. 2. Melaksanakan monitoring capaian kinerja. 3. Menyusun eviden pendukung evaluasi SAKIP. 4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Nanang Yuhanto